

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM : STUDI FENOMENOLOGI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024

Riko Daniel Pandapotan Simatupang¹, Haura Atthahara², Sopyan Resmana Adiarsa³

^{1,2,3}) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: rikodaniel02@gmail.com

Abstrak

Abstrak Keadaan ekonomi yang kurang baik dan rendahnya Pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengalaman pemilih terkait motif praktik politik uang pada Pemilu Tahun 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fenomenologi Alfred Schutz dengan dua dimensi yaitu Because Motive dan In Order To Motive. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini politik uang pada pemilu 2024 dalam dimensi Because Motive menunjukkan bahwa mayoritas politik uang terjadi karena disebabkan faktor internal seperti kurangnya faktor pengetahuan politik, ekonomi dan tingkat pendidikan sehingga mereka belum memahami konteks pemilu secara substansial serta kesadaran politik yang rendah. Kemudian dalam dimensi In Order To Motive menunjukkan bahwa alasan masyarakat menerima politik uang karena suatu keadaan ekonomi dan kebutuhan pokok masyarakat yang perlu di beli dengan uang dan alasan lainya yaitu pemilih berpendapat bahwa cukup disayangkan jika ada yang memberi akan tetapi tidak diterima.

Kata Kunci: Politik uang, Fenomenologi, Motif, Pemilihan Umum, Alfred Schutz

Abstract

Poor economic conditions and low education are factors that cause the practice of money politics that occurs in general elections. This study aims to further explore the experiences of voters related to the motives for the practice of money politics in the 2024 General Election. The theory used in this study is Alfred Schutz's Phenomenology theory with two dimensions, namely Because Motive and In Order To Motive. This study uses a qualitative approach with a phenomenological research method design. The data collection technique uses interviews. The results of the study show that in this case, money politics in the 2024 election in the Because Motive dimension shows that the majority of money politics occurs due to internal factors such as a lack of political, economic and educational knowledge factors so that they do not understand the election context substantially and low political awareness. Then in the In Order To Motive dimension, it shows that the reason people accept money politics is because of an economic situation and the basic needs of the community that need to be bought with money and other reasons, namely voters think that it is quite unfortunate if someone gives but is not accepted.

Keywords: Money politics, Phenomenology, Motives, General Election, Alfred Schutz

PENDAHULUAN

Fenomena politik uang salah satunya yaitu vote buying (pembelian suara) yakni bentuk pemberian berupa uang atau barang, dengan cara memberikan uang/barang tersebut kepada masyarakat (calon pemilih) agar memilih kandidat yang sudah ditentukan dalam suatu pemilihan umum (pemilu) (Abdurrohman, 2021). Politik uang pada saat pemilihan umum ini tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi terjadi juga di berbagai negara lainnya seperti di Amerika Serikat, politik uang ini kerap terjadi pada saat pemilu di negara ini berlangsung (Kryzanek, 2024).

Politik uang juga terjadi di Tanzania (Afrika Timur), yang memperlihatkan bahwa demokratisasi dan liberalisasi ekonomi sejak tahun 1990an telah memperkuat pentingnya uang dalam politik terdapat di berbagai negara di Afrika (Therkildsen, 2022). Fenomena politik uang juga ditemukan di negara lainya yaitu Malaysia. Penelitian Azmi & Zainudin (2021) menyebutkan bahwa politik uang sering terjadi setiap pemilu di Malaysia dengan contoh pada pemilu tahun 2004 yang melibatkan kader partai

UMNO, Isa Samad (mantan Ketua Menteri Negeri Sembilan) terlibat dalam skandal suap dan ketahuan membayar RM300 hingga RM1000 kepada delegasi untuk membeli suara (Nathan, 2006). Selain itu, dari beberapa kasus di atas, politik uang juga dapat memicu munculnya berbagai permasalahan baru, seperti potensi terjadinya korupsi di kalangan pejabat negara (Nurjulaiha, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang mengadakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut (Budiardjo, 2015). Namun pada kenyataannya walaupun sudah jelas diatur dalam Undang-Undang, tetapi di lapangan tetap saja terjadi politik uang dan menjadikan hal yang sangat sulit untuk dihindari (Purnamasari, 2019).

Begitu juga dengan fenomena politik uang yang terjadi di Kabupaten Karawang yang didapatkan dari hasil observasi peneliti yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Karawang, dilihat dari Pemilu sebelumnya yaitu pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 serta Pemilu 2024 yang baru berlangsung waktu yang lalu membuktikan ada beberapa laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Karawang yang terdapat 13 tempat terindikasi. Melihat fenomena politik uang yang terjadi pada Pemilihan Umum 2019, Pemilihan Kepala Daerah 2020 serta yang terbaru yaitu pada Pemilihan Umum 2024 yang terdapat di Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa politik uang menjadi fenomena yang terjadi pada pemilu di Tingkat lokal dan menunjukkan potensi semakin lunturnya nilai-nilai demokrasi pada pemilu di negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pemilih melakukan politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui eksplorasi pengalaman individu pemilih.

METODE

Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian dan dunia intersubjektif (dunia kehidupan) partisipan. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena, pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini lokus penelitian yaitu di Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang dengan menggunakan partisipan sebanyak lima orang yang terdiri dari beberapa wilayah Dusun di Desa Pagadungan dengan mengambil perwakilan latar belakang masyarakat yang heterogen yaitu mulai dari anak muda hingga orang dewasa.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung yang berwujud rangkaian kalimat, bukan rangkaian angka-angka yang dikumpulkan dengan beranekaragam cara, seperti dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen-dokumen yang sebelumnya diolah untuk selanjutnya digunakan (Slamet, 2011). Menurut Lofland & Lofland sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Because Motive (Motif Sebab) Dalam Politik Uang

Fenomena politik uang yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2024 dalam dimensi (Because Motif) terjadi karena faktor internal dari masyarakat tersebut. Seperti kurangnya pengetahuan politik mengakibatkan masyarakat belum memahami konteks pemilu secara substansi dan latar belakang penyelenggaraan pemilu ini. Hal tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan masyarakat di desa tersebut. Sehingga pemahaman akan politik uang dan larangannya masi belum bisa dimengerti oleh masyarakat. Pengetahuan memang sangat berpengaruh dalam berbagai bidang tak terkecuali bidang politik dan pemerintahan.

Faktor kedua yaitu terkait kondisi ekonomi, dengan taraf ekonomi menengah ke bawah memaksa warga untuk menerima politik uang. Karena ada kebutuhan yang harus mereka penuhi dan hal tersebut

berbarengan dengan momen pemilu yang menjadikan hal ini tidak bisa dihindarkan. Secara logika umum memandang bahwa seseorang yang sudah diberi dalam hal ini berbentuk uang maka akan tunduk atau mengikuti arahan orang yang memberi. Masyarakat kelas menengah yang mendapatkan tawaran politik uang ini untuk memilih salah satu paslon, kemungkinan besar juga akan menerima. Hal tersebut walaupun bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi sebagai “uang jajan” atau yang lainnya, atau kemungkinan besar akan menerimanya karena merasa tidak ada salahnya.

Faktor internal tersebut tidak muncul begitu saja melainkan lahir dari rangkaian proses yang panjang. Seperti pengetahuan politik yang masih rendah tentu diakibatkan dari pendidikan politik kepada masyarakat yang belum tersampaikan dengan baik. Hal tersebut menjadi catatan bagi setiap individu dan juga lembaga lain yang bertanggung jawab akan pengetahuan politik masyarakat. Dari segi ekonomi, politik uang erat kaitannya dengan kondisi perokonomian masyarakat. Keadaan yang mayoritas menengah ke bawah menyebabkan politik uang dengan mudah diterima karena dirasakan dapat menyelesaikan masalah masyarakat secara praktis.

Ada beberapa bentuk politik uang yang diterima masyarakat pada pemilu serentak tahun 2024. Mulai dari makanan atau sembako di bungkus dalam bingkisan beserta stiker gambar calon yang harus dipilih. Seperti yang disampaikan oleh partisipan berikut:

“Pernah dalam bentuk bingkisan berupa roti dan marjan yang di bungkus dengan tas yang berisikan stiker gambar calon” (Wawancara JU, 25 September 2024).

Begitu juga yang disampaikan oleh TA yang mengatakan “pernah, berupa bingkisan makanan roti”. (Wawancara TA, 25 September 2024). Selain TA yang juga mengungkapkan hal yang sama adalah SN yang mengungkapkan bahwa “Pernah, dan pas pemilu 14 febuari kemarin di kasih amplop oleh calon anggota DPRD Kabupaten Karawang”. (Wawancara SN, 25 September 2024).

Selanjutnya ditegaskan oleh partisipan lainnya yaitu DN yang mengungkapkan:

“Pernah, dan kemarin pas pemilu presiden dan DPR mendapatkan amplop yang berisikan uang” (Wawancara DN, 25 September 2025).

Terakhir di sampaikan oleh partisipan lainnya yang juga menyatakan hal yang sama, yaitu CH yang mengungkapkan:

“Pernah, emak kemarin di kasih bingkisan makanan roti dan sirup dari calon Dewan, kemudian emak pun bilang terimakasih sudah peduli kepada emak sebagai masyarat bawah” (Wawancara CH, 25 September 2024).

Dengan demikian dari hasil wawancara di atas bisa kita lihat bahwa pada Pemilu tahun 2024 masyarakat menerima politik uang (buying vote) dalam berbagai bentuk yaitu berbentuk uang, barang dan makanan (sembako). Adanya pemberian tersebut dipahami oleh penerima sebagai salah satu kepedulian kepada masyarakat dari kandidat pemberi. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan juga ada masyarakat yang mengalami dalam bentuk pemberian uang di dalam amplop yang ditujukan untuk memilih salah satu anggota DPRD Kabupaten Karawang. Tidak hanya untuk anggota DPRD namun juga praktik politik uang terjadi untuk memilih presiden. Pemberian uang dirasa menjadi cara paling praktis. Hal ini akan memengaruhi psikologi dari masyarakat ketika ia menerima uang makan ia maka berpotensi akan mengikuti apa yang akan diperintahkan oleh pemberi. Uang yang diberikan dengan nominal yang variatif mulai dari Rp.20.000 hingga Rp.50.000. Fenomena tersebut masuk sebagai fenomena politik uang vote buying. Hal ini karena ada harapan yang disampaikan oleh pemberi agar memilih calon yang diinginkan oleh pemberi karena sudah diberikan uang atau barang/makanan.

Bentuk pemberian makanan atau kebutuhan pokok bukan tanpa latar belakang. Kondisi sosial masyarakat yang selalu menganggap pemberian adalah sebuah kebaikan terbawa dalam sistem politik khususnya politik uang. Hal yang sudah menjadi kebiasaan ini sulit untuk diubah, kultur masyarakat yang sering memberi diadopsi menjadi bentuk politik uang yang saat ini dianggap hal yang wajar. Dalam menghilangkan budaya ini tentu tidak mudah, terlebih sudah menjadi budaya yang mengakar lama di latar belakang sosial masyarakat Indonesia.

Dalam kesepakatan atau transaksi politik uang yang diterima oleh masyarakat dilakukan atas suka rela atau tanpa paksaan. Hal tersebut secara tersirat menyatakan bahwa masyarakat juga melakukannya dengan sadar, tidak merasa bersalah dan seolah merupakan hal wajar saja. Tindakan menerima pemberian barang atau uang dari kandidat kepada pemilih dipandang sebagai suatu tindakan yang aman dibandingkan dengan tindakan penyimpangan atau kejahatan lainnya. Jika ada masyarakat yang

menolak uang atau bingkisan, maka si pemberi juga tidak mempersoalkannya dan ia akan berfokus hanya pada masyarakat yang menerima.

Fenomena politik yang dilakukan tanpa paksaan merupakan kelanjutan dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu halus dalam berinteraksi. Terkadang jalinan komunikasi dan koordinasi dalam politik uang dilakukan dengan sangat damai dan perlahan. Masyarakat dengan senang hati memilih calon pemimpin yang diintruksikan untuk dipilih melalui politik uang. Hal ini semakin menunjukkan buruknya kualitas demokrasi di Indonesia.

In Order To Motive (Motif Untuk) Dalam Politik Uang

Praktik politik uang Pada Pemilu Serentak 2024 dalam dimensi In Order To Motive (Motif Untuk) akan menjelaskan mengenai alasan masyarakat dalam menerima politik uang. Dalam hal ini, motif masyarakat sebagai penerima diorientasikan lebih kepada suatu hal yang akan mendatang, tentang apa yang akan masyarakat dapatkan dengan uang yang mereka terima. Temuan di lapangan yaitu para penerima uang memiliki motif untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan dapur. Hal ini disampaikan oleh Partisan SN yang mengatakan :

“Dengan suka rela, karena kondisi saya juga yang memaksa untuk menerima uang tersebut yang nanti akan saya gunakan untuk membeli kebutuhan seperti sembako dan keperluan dapur”. (Wawancara SN, 25 September 2024)

Dalam fenomena politik uang yang terjadi, terdapat beragam pendapat terkait politik uang. Ada yang menilai hal ini merupakan fenomena yang umum bahkan selalu terjadi pada saat pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini sudah lama mengakar serta rutin dan terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Partisan juga menyampaikan bahwa tokoh utama dalam politik uang ini adalah tim sukses yang menghampiri rumah warga. Seperti yang di ungkapkan oleh partisan:

Partisan TA mengatakan bahwa :

“Selalu terjadi pada pemilihan dan kemarin pemilihan presiden dan anggota dewan dan ada saja tim sukses yang datang kerumah untuk memberikan sogokan agar memilih si calon tersebut dan kemarin saya mendapatkan bingkisan makanan/roti yang berisikan gambar si calon” (Wawancara TA, 25 September 2024).

Kemudian dikuatkan oleh Partisan SN yang mengatakan :

“Politik uang itu sudah sering terjadi dari waktu ke waktu dan menjadi suatu hal yang dinantikan oleh saya sebagai masyarakat, karenan tak bisa dipungkiri dan siapa sih sekarang yang tidak butuh uang” (Wawancara SN, 25 September 2024).

Politik uang yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, lagi-lagi tidak terlepas dari kondisi warga yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidup. Bahkan ada informan yang menyatakan bahwa praktik politik uang ini adalah hal yang dinantikan oleh masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh partisan SN di atas.

Makna sesungguhnya yang dipahami oleh masyarakat terkait politik uang pun beragam. Sebagian menganggap ini menjadi fenomena rutin yang selalu terjadi di pemilu. Hal ini seperti sudah menjadi hal yang melekat dari sebuah sistem pemilihan umum. Sebagian lain menilai ini merupakan hal penyuapan yang merampas hak berdemokrasi bagi warga negara. Namun karena politik uang sudah merajalela dan terang-terangan secara umum maka ini menjadi hal yang biasa. Baik masyarakat dan juga timses selalu menjalankan fungsinya dan berulang terus menerus dengan tujuan dan motif yang sama.

Pemahaman yang sudah dianggap biasa dan dirasa sebagai sebuah hal yang benar membuat politik uang menjadi hal yang lumrah. Dengan sudah menjadi kebiasaan yang sudah sering terjadi, karena telah melewati proses panjang dari waktu ke waktu maka menghilangkan politik uang menjadi sangat sulit dilakukan. Sebagian masyarakat sudah mengetahui bahwa politik uang itu dilarang dan merusak demokrasi dan sebagian lainnya belum mengetahui. Namun demikian, mereka yang sudah mengetahui juga bahwa politik uang merupakan pelanggaran ternyata juga melakukan praktik politik uang dan tidak terlalu memperdulikan akibatnya karena menganggap mereka adalah masyarakat biasa. Mereka berpikir bahwa jika ada sanksi dari politik uang ini maka mereka tidak akan terlalu berat menerima akibatnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh keadaan ekonomi yang terbatas. Lalu juga ada masyarakat yang hanya tahu dari orang lain bahwa politik uang itu melanggar, tetapi karena yang lain menerima maka ia ikut saja. Namun secara umum, masyarakat yang menerima adalah mereka yang kurang tahu

dan selama ini tidak ada tindakan dari pihak berwenang, sehingga mereka terus saja melakukan politik uang dan menganggap bahwa ini bukan merupakan sebuah pelanggaran.

Rendahnya pengetahuan politik khususnya tentang pemilihan umum dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari tingkat pendidikan, pekerjaan hingga minimnya sosialisasi politik. Hal ini merupakan proses panjang yang harus dibangun oleh pemerintah dan stakeholder lainnya jika ingin meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal melalui peningkatan pengetahuan politik warga desa. Secara khusus, terkait dengan pemilihan umum baik presiden, kepala daerah hingga anggota legislatif yang dilangsungkan dalam waktu yang periode yang cukup lama membuat masyarakat tidak terlalu fokus dengan pemilihan umum. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat desa. Namun melihat perkembangan teknologi informasi saat ini seharusnya dapat dimaksimalkan dalam mengedukasi masyarakat terkait pendidikan politik.

Taraf perekonomian masyarakat di pedesaan yang mayoritas masyarakat menengah ke bawah juga menjadi suatu hal yang mendesak masyarakat dalam melakukan politik uang. Keadaan ekonomi yang belum sejahtera mengharuskan masyarakat untuk fokus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Hal ini menyisakan sedikit waktu dan energi untuk mempelajari atau memahami isu-isu politik. Kemudian hal ini justru dimanfaatkan timses dalam politik uang karena mereka akan memberikan uang atau bahan pokok sehingga dapat menyelesaikan masalah warga desa secara praktis meskipun bukan solusi jangka panjang. Tentu dengan peningkatan taraf perekonomian warga berarti juga menjadi upaya dalam peningkatan kesadaran politik yang harus di tanamkan pada masyarakat. Demokrasi yang berkualitas perlu dibangun di atas masyarakat yang sejahtera dan terdidik dalam pengetahuan politik sehingga kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan cita-cita demokrasi.

SIMPULAN

Politik uang dalam dimensi Because Motive (Motif Sebab) adalah tindakan yang dilakukan pasti memiliki latar belakang yang sudah terjadi di masa lampau yaitu terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama. Dalam hal ini politik uang di Desa Pagadungan mayoritas terjadi karena faktor internal seperti kurangnya faktor pengetahuan politik, keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan sehingga mereka belum memahami konteks pemilu secara substansial. Fenomena tersebut masuk kedalam bentuk politik uang vote buying atau menukar suara dengan uang/barang. Masyarakat melakukan ini dengan sukarela, sebagian menilai bahwa ini adalah fenomena umum yang biasa, sebagian menganggap ini bentuk perusakan sistem demokrasi. Dalam dimensi In Order To Motive (Motif Untuk) adalah memilih melakukan praktik politik uang karena uang yang diterima bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Selain itu ada anggapan bahwa akan disayangkan kalau uang dari si pemberi tidak diterima atau ditolak. Implikasi hasil penelitian ini mempertegas kembali bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pendidikan memilih. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemilu perlu mendesain pemilu ke depannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi tanpa mengabaikan kualitas memilih.

SARAN

Saran untuk penelitian ini tentang politik uang pada pemilihan umum, studi fenomenologi motif praktik politik uang pada pemilu tshun 2024 ini yaitu : masih banyak kekurangan dalam segi sumber wawancara yang sebagai partisipan dalam penelitian ini. Kemudian semoga penelitian ini lebih banyak lagi di lakukan para mahasiswa, pemerhati demokrasi ingga akademisi, agar lebih membuka mata masyarakat agar melek akan politik dan memiliki pengetahuan poltik yang mencukupi , hingga pada pemilu yang akan datang masyarakat lebih cerdas dalam menntukan pilihan nya dalam proses demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada semua yang terlibat dalam peneitian ini yaitu, Bawaslu kabupaten Karawang, Panwaslu Kecamatan Tempuran hingggs masyarakat Desa Pagadungan yang suda meluangkan waktunya menjadi partisipan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. S. & N. Al. (2020). Alfred Schutz : Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial (Pertama).
- Alex, S. dan. (2014). Ensiklopedia komunikasi. Simbiosis Rekatama Media.
- Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol, 14(3), 592–606.
- Basri, H., & Si, M. (2020). Dalam Pilkada Di Kabupaten Sumenep (Studi Fenomenologis Transaksi Politik Dalam Proses Demokrasi Lokal) Oleh Jurnal Setia Pancasila Vol 1 No 1 Tahun 2020 *Jurnal Setia Pancasila* Vol 1 No 1 Tahun 2020. *JURNAL SETIA PANCASILA* Vol, 1(1), 51–64.
- Batang, B. K. (2024). Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota.<https://batang.bawaslu.go.id/profil/sejarah-bawaslu-kabupatenkota>
- Berenschot, E. A. dan W. (2019). Democracy for sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. *Journal Politic Science*, 30–31.
- Creswell, J. W. (2014). PENELITIAN KUALITATIF & DESIGN RISET Memilih di antara Lima Pendekatan (S. Z. Qudsy (ed.)).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Ilham, M. lalobo. dan T. (2017). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, konsep dan isu strategis (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Kryzanek, D. M. (2024). The Cost and business of democracy in the United States.
- Lumajati, D. (2016). *POLITIKA*, Vol. 7, No.1, April 2016. *Politika*, 7(1).
- Nurjulaiha, S., Rafni, A., Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Ilmu Sosial, F., Negeri Padang Jl Hamka, U., & Author, C. (2022).
- Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teory Political Development (Studi Di Provinsi Jambi). *Indonesian Journal of Social Science Review*, 1(2), 90–99.
- Pahlevi, M. E. T., & Amruobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Sidakpagadungan. (2024). Desa Pagadungan. <https://sidakpagadungan.com/visi-misi>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Therkildsen, A. K. & O. (2022). Money in Politics in Africa - insight from Tanzania